

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan kesimpulan yang didapat dari penulisan tinjauan atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin di KPPN Jambi:

1. Proses pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin di KPPN Jambi melalui beberapa proses dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses dimulai secara *bottom up*. Secara keseluruhan proses, di KPPN Jambi semua pihak terlibat karena penerima manfaat atas belanja modal peralatan dan mesin berdampak pada semua pihak.
2. Pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin di KPPN Jambi dimulai secara berjenjang ke atas atau *bottom up*. Perencanaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya (t+1) dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan (t). Dalam perencanaan tersebut, KPPN Jambi menyiapkan Rencana Penarikan Dana (RPD), Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta menyampaikan usulan kebutuhan anggaran dan usulan belanja modal kepada Setditjen Perbendaharaan melalui SAKURA, kemudian menyusun RKA-K/L pada aplikasi SAKTI. Usulan akan dibahas di Eselon 1, kemudian Setjen

perbendaharaan, APIP, hingga Bappenas, dan DJA. Selain melalui pengajuan RKA-K/L, pengadaan modal peralatan dan mesin dapat dilakukan dengan skema transfer keluar dan transfer masuk kepada Kantor Pusat. Skema ini merupakan skema apabila secara anggaran tidak dimungkinkan, sehingga melalui PUSINTEK ataupun langsung ke Kantor Pusat.

3. KPPN Jambi dalam melaksanakan belanja modal peralatan dan mesin telah memenuhi nilai kapitalisasi sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu lebih dari Rp1000.000,-. KPPN Jambi pada Tahun 2019 anggaran belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp7.548.000,- dengan realisasi sebesar Rp7.546.000,- atau sebesar 99,97%. Anggaran tersebut ditujukan untuk penggantian inventaris lama, dan pembelian inventaris baru. Tahun 2020 anggaran belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp504.418.000,-, dengan realisasi Rp504.418.000,- atau sebesar 100%. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan bermotor sebanyak 1 item, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 4 item, dan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sebanyak 5 unit. Tahun 2021 anggaran belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp20.738.000,-, dengan realisasi Rp20.680.000,- atau sebesar 99,72%. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk peralatan fasilitas perkantoran sebanyak 2 item, dan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 1 item.

4. KPPN Jambi dalam anggarannya mengalami beberapa kali revisi DIPA yang cukup banyak, yaitu enam kali revisi untuk tahun anggaran 2019, sepuluh kali untuk tahun anggaran 2020, dan sembilan kali untuk tahun anggaran 2021. Realisasi anggaran KPPN Jambi sendiri cukup tinggi, yaitu di atas 99%, yaitu 99,97% untuk tahun anggaran 2019, 100% untuk tahun anggaran 2020, dan 99,72% untuk tahun anggaran 2021. Anggaran terbesar dianggarkan pada tahun 2020, dikarenakan adanya pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) sebesar Rp251.000.000,- dan pengadaan PC unit (sebanyak 9 unit) sebesar Rp114.840.000,-.
5. Kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin di KPPN Jambi antara lain Pertama yaitu prioritas anggaran yang tidak dialokasikan khusus untuk akun 532111, atau tidak dalam kondisi genting. Kedua, berdasarkan Laporan Pengguna Barang apabila barang berjumlah lebih dari total keseluruhan anggota kantor, dan kualitas dianggap baik meskipun satker, dalam hal ini KPPN Jambi, memang membutuhkan akan sulit untuk disetujui ketika penganggaran. Ketiga, kesalahan individu yang kurang mawas terhadap peraturan dan jadwal yang telah ditentukan untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, hingga pelaporan, terutama pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin.

4.2 Saran

Berdasarkan kendala yang ditemukan penulis temukan dalam tinjauan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada KPPN Jambi, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Meningkatkan akurasi perencanaan keperluan belanja modal peralatan dan mesin, agar ke depannya tidak mengalami panik atau perlu melakukan pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin skala besar, sebagai bentuk penanganan apabila pengajuan belanja modal peralatan dan mesin di KPPN Jambi sering tidak mendapat prioritas.
2. Menerapkan kebiasaan mawas peraturan dan mawas jadwal, serta menggiatkan memo ataupun pengingat untuk menyampaikan rancangan dan laporan tepat waktu.
3. Melakukan inventarisasi, dan mengajukan pelelangan untuk aset dengan nilai manfaat mendekati 0 (nol) atau telah melebihi nilai manfaat, dan mengajukan *earmarking* untuk belanja modal peralatan dan mesin agar anggaran terpenuhi.